

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Perjuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks negara, perjuangan terbagi menjadi dua kategori, yaitu perjuangan meraih kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang melakukan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dikenal sebagai pahlawan revolusi. Seperti contohnya ialah Soekarno, Mohammad Hatta, Soedirman, dan masih banyak lagi. Sebaliknya, tokoh-tokoh yang melakukan perjuangan pasca kemerdekaan dikenal sebagai pahlawan reformasi, perjuangan yang dilakukan tidak lain agar tercipta perbaikan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Tokoh-tokoh reformasi memperjuangkan bangsa dari penguasa negara. Eep S Fatah (1998) memaparkan enam skenario reformasi, yaitu pertama, retaknya aliansi strategis Orde Baru. Kedua, regenerasi politik. Ketiga, radikalisasi rakyat dan hancurnya legitimasi. Keempat, bangkitnya gerakan sosial. Kelima, desakan internasional. Keenam, krisis ekonomi yang tak terkelola.

Titik balik porak-poranda benteng terakhir keabsahan rezim orde baru yang menimbulkan kerusuhan massal di berbagai tempat menurut Ricklefs (2009) adalah peristiwa terbunuhnya mahasiswa Trisakti, keruntuhan ekonomi, kebrutalan ABRI, korupsi rezim, dan kemustahilan akan adanya reformasi. Hal itu dibenarkan oleh Poesponegoro dan Notosusanto (2008, hlm. 669) yang mengatakan bahwa kematian empat mahasiswa Trisakti memicu berbagai gerakan proreformasi untuk menyatukan langkah dan mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri. Eric Hiarij melengkapi perihal kerusuhan massal (2005, hlm. 262-263) sebagai berikut:

Pada awal Mei malapetaka finansial telah berubah menjadi resesi ekonomi total. Gerakan oposisi kian menguat dan kerusuhan sosial berkobar di banyak kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Solo. Kerusuhan mulai menyebarkan ketakutan akan situasi sosial yang bertambah kacau dan tak terkendali yang menghantui elit yang berkuasa, terutama ketika rumah milik Harmoko di Solo dan Liem Sioe Liong di Jakarta dirusak oleh para

Ikrimah Vella Riyanti, 2017

REKAM JEJAK EMHA AINUN NADJIB DALAM PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA (1991-2013)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perusuh. Perkembangan ini akhirnya memecah belah Soeharto dan sekutu-sekutu dekatnya.

Kondisi saat itu sangat tidak terkendali, sehingga pada tanggal 19 Mei, Soeharto membujuk sekelompok pemimpin Muslim untuk mendukung agenda reformasi politiknya, kemudian pada tanggal 21 Mei mengumumkan pengunduran diri setelah tawaran konsesi untuk membentuk komite reformasi dan mengubah susunan kabinet seminggu sebelumnya gagal mengendorkan gerakan oposisi (Hiariej, 2005, hlm. 253).

Satu dari sekelompok pemimpin Muslim yang bertemu dengan Soeharto di Istana Negara pada tanggal 19 dan 21 Mei adalah Emha Ainun Nadjib (selanjutnya disebut Emha). Seorang budayawan yang mendapatkan penghargaan Satyalancana Kebudayaan 2010 pada bulan Maret 2011. Emha juga diberitakan dalam surat kabar *Jawa Pos* (5 September 1991) sebagai tokoh Indonesia yang mendapat Anugerah Adam Malik pada tahun 1991 di Bidang Kesusastraan.

Toto Raharjo menjelaskan di dalam Majalah *Sabana* (2015) bahwa Emha melakukan perjuangan tanpa organisasi, tanpa wakil dari kelompok manapun melainkan sebagai pribadi Emha itu sendiri sehingga orang lain lebih bisa menerima masukan darinya tanpa kecurigaan. Toto Raharjo menilai bahwa hal itulah yang membuat Soeharto bersedia menerima saran dari Emha sepanjang reformasi 1998. Padahal, semasa Soeharto berkuasa tak kurang-kurangnya Emha mengkritik rezim Orde Baru dengan ekspresi yang keras.

Surat kabar *Jawa Pos* (10 September 1991) memberitakan perihal Emha di mata Kuntowijoyo yang dianggap sebagai pemuda yang kritis, suka protes, tapi sekaligus religius. Pernyataan kritis dan suka protes tersebut terbukti dari tulisan-tulisan dan aktivitas Emha. Satu diantara banyak tulisannya yaitu pada tanggal 8 Mei 1998, Emha menulis artikel dengan judul “Selebaran Terang Benderang; Tentang 11 Mei, Dewan Negara, dll” yang dirilis berdasarkan situasi sosial masyarakat yang mulai digoncang krisis moneter. Dalam tulisannya, Emha menyarankan kepada Soeharto agar segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat untuk menghindari bertambahnya korban moril maupun materiil (Agustian, 2015).

Empat tahun sebelum peristiwa reformasi 1998 yaitu tanggal 17 November 1994, Emha beserta dua kawannya yang bernama Umar Kayam dan Ashadi Siregar memberikan Pernyataan Kebudayaan Akhir Tahun 1994 yang tercatat di dalam surat kabar *Surabaya Pos* sebagai berikut:

- 1) Kepada pemerintah agar mulai menunjukkan itikad yang sungguh-sungguh untuk menyelenggarakan keadilan dalam distribusi informasi, dengan menghargai secara adil hak setiap kelompok masyarakat untuk membentuk institusi informasi
- 2) Kepada semua institusi pers, dalam posisi apa pun, agar tetap mengupayakan diri untuk menjadi institusi informasi masyarakat, dalam arti memposisikan masyarakat sebagai pemilik utama keadilan informasi, memposisikan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama budaya informasi, serta tidak meletakkan institusi pers sebagai subordinan yang berada dalam kooptasi kekuasaan
- 3) Kepada seluruh komponen masyarakat agar bersikap lebih kritis terhadap keberadaan institusi pers, sehingga dapat membedakan antara pers yang sudah terkooptasi oleh sistem kekuasaan negara, dengan pers yang berusaha sungguh-sungguh untuk membangun diri sebagai institusi masyarakat.

Yogyakarta, 12 November 1994

Umar Kayam

Ashadi Siregar

Emha Ainun Nadjib

Keberanian Emha terhadap rezim Orde Baru menjadikannya sebagai sosok yang fenomenal tetapi juga kontroversial. Ditegaskan oleh halaman *p.o.t.r.e.t* (8 Januari 1995) yang terdapat pada arsip perpustakaan Emha Ainun Nadjib, halaman tersebut memberitakan bahwa:

Emha adalah sosok seniman, budayawan, dramawan serta berjubel predikat lain yang kontroversial. Ia bisa muncul di mana saja. Di panggung, di mimbar bebas, ikut berdemonstrasi, atau nongkrong bersama tukang-tukang becak. Emha juga akrab dengan para pejabat, namun ia juga kena cekal di sana-sini.

Perihal pencekalan Emha, Majalah Mingguan *Gatra* (2 Mei 1996) memberitakannya sebagai berikut:

Emha Ainun Nadjib berkali-kali terkena cekal. Gubernur Jawa Tengah, Ismail, melarang Emha berceramah di wilayahnya pada 1992. Drama Pak Kanjeng disetop pada hari kedua di Yogyakarta, diawal 1994, dan dilarang sama sekali mentas di Surabaya. Lantas Juni 1995, ia gagal berceramah di

Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, karena polisi tak memberi izin. Tiga hari kemudian ia dicekal lagi di Denpasar.

Ada pula pada surat kabar *Republika* (30 Mei 1994) yang ditulis oleh Sudarso perihal yang sama, bahwa:

Belum lama ini diberitakan bahwa cekal kembali menimpa Emha Ainun Nadjib, Cak Nun – panggilan akrab Emha – yang sudah menjadi langganan pencekalan ini, bukan saja dilarang berbicara pada Ultah PPP di Semarang, bahkan ia juga dicekal di rumahnya sendiri – Desa Kasihan Taman Tirto, Bantul, Yogyakarta. Acara kangen-kangen seniman Yogya dengan W. S. Rendra yang dilaksanakan di rumah Emha dibubarkan oleh aparat keamanan. Kendati Emha mengaku sudah melaporkan acara dirumahnya itu kepada lurah setempat, pihak aparat tetap menganggap ilegal dan karena itu acara harus dibubarkan.

Berdasarkan ketiga berita tersebut penulis menghipotesiskan bahwa hal tersebut terjadi karena kondisi politik Indonesia saat itu. Sama halnya ketika para pejuang kemerdekaan membentuk organisasi dengan tujuan utama untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh revolusi ditangkap dan diasingkan bahkan dipenjara. Pada Rezim Orde Baru, hal itu dikenal dengan pencekalan. Pencekalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencekal. Sedangkan mencekal yaitu mencegah dan menangkal sehingga tidak dapat bepergian. Menilik aktivitas Emha pada kurun waktu tersebut adalah mengunjungi daerah-daerah untuk mementaskan teater berupa drama dan musikalisasi puisi.

Pasca reformasi 1998, Emha tidak lagi bersentuhan dengan permasalahan pemerintahan. Hal itu sejalan dengan Darmaningtyas selaku Pengamat Pendidikan, ia mengatakan “Emha mampu meyakinkan Soeharto bahwa tidak jadi presiden *yo ora patheken*. Tetapi pasca reformasi justru menghilang dari hiruk-pikuk politik nasional...” (Betts, 2006, hlm. 26). Meski begitu, kembali muncul pemberitaan mengenai Emha di tahun 2009. Bukan lagi perihal pencekalan, tetapi pemberitaan mengenai sesatnya Emha dari ajaran Islam. Ahmad Hizbullah dalam blog pribadinya (2009) mengkritik Emha dengan judul *Shalawat Global yang Kelewat Gombal*. Muncul kembali pemberitaan yang sama dari website Berita Islam dan Aliran Sesat yaitu www.nahimunkar.com dan www.arahmah.com di tahun 2013.

Pemberitaan mengenai sesat tersebut tidak terlepas dari aktivitas Emha yang sudah dilakukan jauh sebelum peristiwa reformasi 1998. Aktivitas tersebut kini dikenal dengan Maiyah Nusantara bersama Gamelan Kiai Kanjeng. Perihal Maiyah Nusantara, Helmi Mustafa menjelaskan dalam percakapan melalui telepon tanggal 20 September 2015 bahwa saat ini Maiyah Nusantara terbagi menjadi dua kategori, yaitu (1) Maiyah Nusantara reguler yang diselenggarakan oleh pihak Emha dan Gamelan Kiai Kanjeng setiap satu bulan sekali di Yogyakarta dengan nama Mocopot Syafaat, di Jakarta dengan nama Kenduri Cinta, di Surabaya dengan nama Bangbang Wetan, di Semarang dengan nama Gambang Syafaat, dan di Jombang dengan nama Padhang Mbulan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang hadir. (2) Maiyah Nusantara yang dilakukan berdasarkan undangan masyarakat dan berbagai pihak. Emha menjadi pembicara utama dalam aktivitas Maiyah Nusantara. Jemaahnya pun tersebar banyak di seluruh Indonesia. Di dalam aktivitas tersebut Emha banyak berbicara mengenai persoalan kontekstual yang berkaitan dengan kenegaraan, kemanusiaan dan juga keagamaan.

Melihat aktivitas Emha sebelum dan sesudah peristiwa reformasi 1998, secara faktual Emha adalah tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh cukup besar. Karena itu Emha memiliki massa yang tidak sedikit jumlahnya. Namun uniknya, Emha sama sekali tidak memanfaatkan peluang besar tersebut untuk karir pribadinya. Seperti yang Emha tegaskan dalam bukunya berjudul *Kiai Untung, Kiai Bejo, Kiai Hoki* sebagai berikut:

Saya sudah keliling ke ribuan desa, ratusan kecamatan dan kabupaten, atas daulat masyarakat terhadap saya. Sesungguhnya itu semua investasi dan akses besar jika saya mau memakainya untuk kepentingan karier pribadi saya. Tapi saya berpuasa tidak membiarkan diri saya jadi tokoh, ustadz, ulama, pejabat, wakil rakyat, atau apapun. Bersamaan dengan itu saya tidak mengakses ekonomi siapapun untuk menjadi pengusaha. Saya tidak pernah memakai hak-hak pribadi saya untuk menempuh karier pribadi. Tidak pernah memperjuangkan peluang-peluang pribadi yang hampir semua orang mendayagunakannya. Saya tidak meminta atau diberi fasilitas oleh bagian manapun dari negara, birokrasi dan pejabat (Nadjib, 2007, hlm. 125).

Penjelasan dari berbagai sumber tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Emha adalah pribadi yang multi talenta namun unik karena tidak lepas dari pro dan kontra. Emha tidak berpegang pada instansi manapun atau bahkan jabatan sekalipun. Tokoh intelektual yang memiliki pemikiran kritis terhadap perkembangan politik Indonesia. Berperan mengatasi persoalan sosial masyarakat melalui kegiatan Maiyah Nusantara namun tetap mempertahankan prinsipnya untuk tidak memanfaatkan kesempatan demi mendapatkan jabatan serta kekuasaan dalam bidang pemerintahan. Padahal, secara rasional, saat peristiwa Reformasi 1998 Emha menjadi tokoh yang memiliki peran cukup penting sehingga memiliki peluang untuk mendirikan sebuah partai yang akan diikuti oleh banyak massa. Namun pada kenyataannya, Emha tetap memilih tidak memanfaatkannya.

Ian L. Betts dalam bukunya yang berjudul *Jalan Sunyi Emha* (2006) menilai bahwa sumbangan Emha dalam pemikiran kebudayaan, seni dan keagamaan tetap tak dikenal dan tak mendapat penghargaan sesuai nilai sejatinya bagi bangsanya. Pernyataan dari Betts tersebut menjadi sebab khusus penulis untuk menyusun skripsi ini. Adapun sebab umumnya yaitu pertama, menggambarkan perjalanan Emha Ainun Nadjib dikaitkan dengan perkembangan politik Indonesia. Kedua, kurangnya *literature* mengenai kiprah Emha Ainun Nadjib yang berhubungan dengan politik Indonesia. Ketiga, belum ada yang meneliti mengenai Emha Ainun Nadjib dalam bentuk skripsi di Departemen Pendidikan Sejarah UPI. Maka diputuskan melalui judul: *Rekam Jejak Emha Ainun Nadjib dalam Perkembangan Politik Indonesia (1991-2013)*. Penulis menggunakan tahun 1991 karena pencekalan bermula pada tahun 1992, karena itu perlu dikaji aktivitas Emha Ainun Nadjib pada tahun 1991. Mengenai 2013 karena pemberitahuan sesat bermunculan di tahun tersebut.

I.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan penelitian yang akan berkaitan dengan skripsi ini, terutama mengenai

bagaimana Rekam Jejak Emha Ainun Nadjib dalam Perkembangan Politik Indonesia (1991-2013)? Dengan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Emha Ainun Nadjib dicekal?
2. Bagaimana peran Emha Ainun Nadjib dalam Peristiwa Reformasi Indonesia 1998?
3. Mengapa Emha Ainun Nadjib diberitakan sesat dari ajaran Islam?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai “Bagaimana rekam jejak Emha Ainun Nadjib dalam perkembangan politik Indonesia (1991-2013)?”. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai kehidupan Emha Ainun Nadjib hingga timbul pencekalan
2. Mendeskripsikan peran Emha Ainun Nadjib dalam peristiwa Reformasi Indonesia 1998
3. Menganalisis berita sesatnya Emha Ainun Nadjib dari ajaran Islam

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendokumentasian kontribusi Emha Ainun Nadjib terhadap Indonesia untuk generasi penerus bangsa
2. Menambah khasanah keilmuan tokoh nasional
3. Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya

I.5 Struktur Organisasi Skripsi

Untuk memudahkan memahami penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika organisasi skripsi. Bab ini menjadi pengantar dari isi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari konsep dan berbagai pendapat yang bersumber pada *literature* yang berhubungan dengan tema penulisan skripsi ini seperti biografi Emha Ainun Nadjib, dan kondisi sosial politik di Indonesia pada tahun 1991-2013.

Bab III Metode Penelitian, berisi penjelasan mengenai proses dalam penyusunan skripsi sesuai dengan kaidah penelitian sejarah yang terdiri dari: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Bab IV Rekam Jejak Emha Ainun Nadjib dalam Perkembangan Politik Indonesia (1991-2013), merupakan penyampaian hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang dibahas pada bab pertama.

Bab V Kesimpulan dan Saran, terdiri atas kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang dilengkapi dengan saran untuk dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.